

HYGIENE; SEBUAH BUDAYA YANG TERBUANG NAMUN DIRINDUKAN

Muhammad Misbahuddin¹

Agus Setyawan²

IAI Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

misbah_historian@insuriponorogo.ac.id¹

setyawanagus09@gmail.com²

No. WA: 081703350833

Abstract: *This paper aims to explain and explore the understanding of the Islamic boarding school community about cleanliness. This historical, anthropological research uses an ethnographic method with a postcolonial approach. The focus is on community activities in Ponorogo in applying their understanding of cleanliness. The argument of this paper is that the efforts of the people of Ponorogo in implementing cleaning activities are more of a strategy for maintaining a "real" clean cultural identity as the culture adopted by Indonesian people in general. The construction of a pure culture in the community tends to be considered outside the norms that have been standardized by the health office so that standardized patterns of cleanliness continue to be echoed in the Ponorogo community. Such a view is actually the structure of colonialism thinking, where standardization continues to discourse into different cultures of society and makes the discourse superior and worthy to be followed.*

Kata Kunci: *Clean Culture; Ponorogo community; colonialism;*

PENDAHULUAN

Kajian-kajian sejarah kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa nyatanya belum selesai pasca penelitian para scholar seperti Pigeaud,¹ Muhaimin² dan lain sebagainya. Kajian kebudayaan Jawa terus mengalami perubahan seiring masyarakat Jawa yang terus berkembang. Penelitian-penelitian mutakhir tidak lagi memandang kebudayaan sebagai sebuah gejala etis, estetis yang penuh dengan simbol, namun telah bergeser dalam gejala-gejala sosial yang mempengaruhi kehidupan berbangsa.³ Sebagaimana penelitian yang dilakukan Timothy Daniel tentang bagaimana politik, agama, kebijakan negara dan praktek-praktek budaya berinteraksi dan saling mempengaruhi.⁴ Menurut Timothy,

¹ Theodore G. Th Pigeaud, *Java in the 14th Century A Study in Cultural History*, 1960, <http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-94-011-8150-1>.

² Abdul Ghoffur Muhaimin, "The Islamic Traditions of Cirebon:," *ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia*, 1995, 304.

³ Tony Rudyansjah, *Antropologi Agama; Wacana-wacana Mutakhir dalam kajian Religi dan Budaya* (Jakarta: UI Press, 2012)

⁴ Timothy P Daniels, "Islamic Spectrum in Java," t.t., 210. Sebelum menguraikan lebih panjang mengenai kebudayaan, kiranya perlu kita sampaikan disini mengenai apa yang dimaksud dengan kebudayaan. Berbicara mengenai kebudayaan adalah berbicara mengenai hasil, cipta dan karsa manusia. Oleh karena itu, Koenjaraningrat menyebutkan terdapat tujuh unsur kebudayaan sebagai hasil cipta karasa manusia tersebut, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem religi, sistem mata pencaharian, teknologi dan kesenian. Baca Konjrataningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Renita Cipta, 1999). Namun perkembangan kebudayaan terus berkembang, sehingga tujuh unsur kebudayaan tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan yang ada. Oleh karena itulah Kuntowijoyo menambahkan gaya hidup, upacara, pelbagai festival dan fashion dapat juga dikatakan bagian dari sebuah kebudayaan. Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam bingkai Strukturalisme transsedental* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 183. Upaya Kuntowijoyo ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang diungkapkan oleh koleganya, Sartono, bahwa gaya hidup yang dilakukan oleh sebagian komunitas tertentu adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Sartono Kartodirdjo dan A. Sadewo *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: UGM Press, 1993), hlm. 153. Mengikuti pendapat tersebut, kebudayaan yang penulis maksud adalah gaya hidup yang diterapkan oleh kalangan santri.

globalisasi menghadirkan pembentukan definisi baru tentang pelbagai hal, baik itu kebudayaan, agama, dan politik, sehingga secara tidak sadar memunculkan praktik kebudayaan yang baru pula.⁵

Saat ini, kecenderungan baru mulai muncul Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jawa, bukan lagi kebudayaan dan konsepsi masyarakat Jawa yang penuh simbol masa lalu yang tertuang dalam lukisan, ukiran, tarian Reog, bahkan etika-etika, tetapi kini mulai memaknai sebuah kebudayaan yang sedang berkembang dengan simbol-simbol baru dalam gaya hidup modern yang dipadupadankan dengan Islam dan globalisasi, sehingga menjadi sebuah life style masyarakat menengah. Bahkan tidak jarang menjadikan simbol-simbol tersebut sebagai bagian dari komodifikasi agama.⁶ Situasi tersebut semakin diperkuat lagi dengan datangnya wabah covid 19 yang mendera seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa wabah tersebut membawa terbulasi kebudayaan baru dalam masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Pada era pasca pandemi seperti saat ini, proses estetika pada kehidupan terus terjadi dengan ciri menguatnya kecenderungan hidup bersih dengan proses hidup sehat. Pada titik ini diskursus kebudayaan terjadi pada masyarakat Indonesia, utamanya pada masyarakat kecil di wilayah-wilayah Jawa. Di banyak kota-kota besar di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, gaya hidup masyarakatnya kerap kali didekte oleh kebudayaan industri. Misalnya konsep bersih dan sehat, kini hadir melambangkan kehidupan dunia modern. Disamping itu kekhawatiran untuk kembali terserang virus covid 19 menyebabkan masyarakat mencoba untuk menerapkan hidup bersih.⁷

Konsep bersih dan sehat menjelma sebagai standar hidup baru bagi masyarakat dalam mengembangkan budayanya. Mulai dari kota-kota besar hingga di kota-kota kecil seperti di Ponorogo mulai menerapkan konsep bersih dan sehat dengan menyediakan alat pencuci tangan dan wajib memakai masker ketika masuk dalam institusi pemerintahan. Bersih dan sehat bukan lagi hanya sebagai proses untuk pemenuhan hidup, tetapi juga merupakan kebutuhan simbolis yang dikaitkan dengan proses citra seseorang dan identitas sosial. Dalam kaitannya dengan identitas sosial di sebuah wilayah di kota-kota kecil, konsep ini juga bisa jadi penanda tingkat pendidikan seseorang, apakah ia dapat dikategorikan sebagai berpendidikan “modern” atau “tradisional” bahkan “kurang berpendidikan”.

Ketika pandemi menyerang kota Ponorogo atau wilayah Matraman, setidaknya terdapat masyarakat-masyarakat yang menolak untuk menerapkan konsep bersih dan sehat, sekalipun mereka adalah orang yang terdidik. Wacana kebersihan yang diproduksi oleh pemerintah tentang bersih dan sehat berusaha di counter dengan wacana kesehatan yang diproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Akibatnya saat itu jumlah penderita covid di

⁵ Daniels.

⁶ Abdur Rozaki, “Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas,” no. 2 (2013): 14.

⁷ Suprpto Suprpto, “Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Era Pandemi COVID-19,” *Abdimas Singkerru* 1, no. 1 (2021): 1–7.

Ponorogo terus saja meningkat. Data yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat menyatakan hampir di seluruh wilayah di Ponorogo terdapat penderita covid.⁸

Realita tersebut oleh para sarjana sosial tidak dilihat sebagai sebuah pertarungan wacana yang lahir ditengah-tengah masyarakat tentang kebersihan. Namun hanya dilihat sebagai sebuah aktivitas dalam hidup bersih semata, tanpa dihubungkan dengan realitas-realitas sosial budaya yang muncul atas perilaku tersebut.⁹ Oleh karena itu, penulis dalam kajian ini lebih kepada melanjutkan kajian yang telah dilakukan oleh para kesarjana lain tentang kesehatan dan kebersihan.

Dalam tulisan ini akan menelisik praktik kebersihan yang diterapkan oleh masyarakat Ponorogo dan bagaimana wacana-wacana kebersihan tersebut dibangun dan mengalami proses perubahannya, apakah norma-norma agama mengatur dengan kuat sebagai legalitas kuasa dalam membentuk norma kehidupan bersih. Beberapa pokok permasalahan yang diangkat dalam artikel ini diantaranya apakah Masyarakat Ponorogo dalam membangun kebudayaan bersih lebih dipengaruhi oleh keterpengaruhan budaya yang berlaku dalam masyarakat Jawa? Lantas bagaimana negara mengubah wacana tersebut dalam kerangka pembangunan kesehatan?, bagaimana para tokoh agama bernegosiasi dan mengubah cara pandang masyarakat Ponorogo dalam budaya bersih sebagai sebuah perilaku masyarakat?

HASIL DAN PEMBAHASAN

DETERMENISME BUDAYA

Secara umum dalam masyarakat Ponorogo, budaya sehat dan bersih bukan menjadi hal penting, bahkan cenderung diabaikan. Perolehan dan pemenuhan kebutuhan hidup lebih penting daripada sekedar memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebersihan.¹⁰ Hal ini setidaknya terlihat dari pandangan dan pengamatannya Tillema sebagai seorang Dokter yang datang ke Hindia Belanda pada akhir abad ke- XX. Ia mengatakan bahwa kondisi pemukiman yang ada di Semarang, baik itu pemukiman masyarakat pribumi maupun masyarakat Belanda sangat tidak sehat.¹¹ Sekalipun pengamatannya pada wilayah Semarang, namun agaknya kondisi tersebut hampir dapat dengan mudah dijumpai hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kebersihan yang menjadi standar hidup tidak ia

⁸ Team Penyusun, *Infografis Covid 19 Kabupaten Ponorogo tahun 2020* (Ponorogo: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2020), hlm 12

⁹ Veta Lidya Delimah dkk., “Meningkatkan Kebersihan Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif* 3, no. 2 (1 Agustus 2022): 57–66, <https://doi.org/10.32493/jlklkk.v3i2.p57-66.23062>.

¹⁰ Muhammad Misbahuddin, “Baju Lurik, Kemben Dan Kemeja Perubahan Fashion Masyarakat Jelata Di Surakarta Abad Ke-20,” *PROCEEDINGS: Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 2 (14 Mei 2017): 998–1006. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kontruks masyarakat tentang kesehatan dan kebersihan itu sendiri. Rokok misalnya, di Indonesia, rokok merupakan budaya yang terus menjadi perbincangan yang seksi. Perdebatan itu tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga ekonomi, politik dan sosial. Di Amerika, masyarakatnya memandang rokok dengan sebuah ketakutan yang amat sangat. Mereka memandang sebagai sesuatu yang menjijikkan layaknya alien yang mampu membunuh manusia, dengan kekotorannya. Meskipun rokok merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi menurut Terry Eagleton, ia merupakan bagian dari sebuah maipulasi kebudayaan. Lihat Terry Eagleton, *The Idea of Culture*, terj. Ali Noer Zaman (Surabaya: Nusantara Press, 2016), hlm. 130

¹¹ Tellema, H.F, *Kromo Blanda, Over't Vraagstuk van "het Wonen" in Kromo's groote land* Vol III. (s . Gravenhage: Van den Masin, 1915-1923), hlm. 71

dapatkan ketika melihat pemukiman yang ada. Pengabaian kebersihan itu baik, pada diri sendiri, tetapi juga kepada lingkungan, akibatnya banyak dari penduduk pribumi terserang epidemik penyakit.

Harus diakui bahwa proses ini tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal dan internal dalam masyarakat itu sendiri. Dari faktor eksternal, perbedaan klasifikasi sosial yang terjadi pada masa kolonial dengan membentuk empat golongan di tengah-tengah masyarakat Indonesia telah berhasil membentuk disparitas pengetahuan. Hampir disetiap tempat, kecuali di area publik, terjadi pembatasan sosial oleh pemerintah Belanda. Bahkan untuk memasuki kolam renang yang bersih pun, masyarakat pribumi tidak diperkenankan.¹² Akibat proses pembatasan sosial itu, meminjam istilahnya Henk Schulte Nordholt bahwa pemerintah telah melakukan sebuah kekerasan terhadap masyarakat pribumi, dengan pengabaian atas pengetahuan kesehatan masyarakat pribumi.¹³ Sedangkan dari segi internal masyarakat Indonesia, khususnya dalam masyarakat Jawa, tidak terdapat tuntunan bagaimana ia harus melakukannya lingkungannya, kalau pun ada lebih kepada memperlakukan sungai sebagai tong sampah. Dalam *folklore* yang ada dalam masyarakat Jawa misalnya, terdapat sebuah nyanyian atau lagu anak-anak yang sangat familiar bagi masyarakat di desa-desa di Jawa tentang bagaimana mereka memperlakukan sungai. Lagu anak-anak itu, kini mungkin mulai hilang dalam ingatan anak-anak modern, karena sudah tidak diperkenalkan lagi. Nyanyian itu berbunyi;

“e dayohe teko, e gelarno klasa, e klasanae bedah, e tambalen jadah, e jadahe mambu, e pakakna asu, e asune mati, e buangke kali, e kaline banjir, e buangke pinggir”, dalam terjemahan bebasnya adalah e tamunya datang, e gelarkan tikar, e tikarnya robek, e tamballah dengan jadah, e jadahnya berbau, e kasihkan anjing, e anjingnya mati, e buanglah ke kali, e kalinya banjir, e buanglah ke pinggir.”

Minimnya data mengenai siapa pengarang lagu ini, membuat kapan lagu ini dibuat dan beredar tidak ada yang mengetahuinya. Lepas dari semua itu, nyanyian ini jelas memberi indikasi kuat bahwa, bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa memperlakukan sungai. Mereka diajarkan bahwa sungai adalah tempat pembuangan segala sesuatu. Seekor anjing yang seharusnya dikubur agar tidak menimbulkan bau dan penyakit, ternyata harus dibuang di sungai. Hal ini aneh memang, padahal menurut Kuntowijoyo sebagai negara yang menekankan kepada konsep masyarakat agraris, masyarakat pedalaman, dalam hal ini kota Ponorogo pastinya memiliki pengetahuan tentang konsep lingkungan yang cukup baik,¹⁴ namun, kenyataannya bertolak belakang. Sampah menjadi problem klasik, baik dari masa kolonial hingga masa modern

Selain itu, sejauh menyangkut perkembangan budaya kebersihan pada awal abad ke-20, dramatisasi mengenai budaya bersih, bahkan masalah kuman, bakteri belum terkontruks

¹² Elien Utrecht, *Melintasi Dua Jaman; Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah kemerdekaan*, terj. Ahmad Sunjayadi, (Jakarta: Komunitas bambu, 2006), hlm. 33

¹³ Henk Schulte Nordholt, “De-Colonising Indonesian Historiography,” t.t., 25.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), hlm. 49.

dalam benak masyarakat Jawa. Oleh karena itu, mulai dari pembangunan rumah hingga persoalan buang hajat, masyarakat Jawa kerap kali meniadakan unsur kesehatan. Rumah-rumah kumuh dapat dijumpai pada saat itu. Foto-foto kolonial dapat dengan mudah membuktikan asumsi tersebut. Dalam konteks budaya buang hajat misalnya, dalam era modern, masih dapat dengan mudah ditemukan sebagian masyarakat Ponorogo buang hajat dalam bilik-bilik bambu yang berhubungan langsung dengan sungai-sungai yang ada disekitar rumah.

Sebuah budaya yang setidaknya telah berkembang semenjak abad ke-17. Kondisi tersebut terus menjadi budaya hingga kini. Setidaknya hal tersebut terlihat pada masyarakat Demak, dimana pada awal tahun 2017, bupati Demak membuat program jambanisasi bagi masyarakat Demak. Tidak dapat dipungkiri, dalam budaya Islam yang berkembang di Timur Tengah pada abad ke-7 tidak ada teknologi yang mengatur bagaimana buang hajat. Islam lebih mengatur tentang etika buang hajat.¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat dalam konstruksi kesehatan dan kebersihan. Pesantren-pesantren yang ada di kota ini pun membangun logika kesehatannya dengan cara yang unik. Logika kebersihan lebih kepada pembersihan badan dan simbolisasi “kesucian” spiritual.¹⁶ Para santri mengatakan bersih belum tentu suci, akan tetapi suci sudah pasti “bersih”, sehingga kenapa kita mengejar sebuah kebersihan. Oleh karena itu di pesantren, higienitas bukanlah masalah terpenting dalam kehidupan masyarakat pesantren, sehingga tidak jarang ditemukan gerobak pembuangan sampah berdampingan dengan baju-baju yang tengah di jemur atau sampah-sampah dengan berserakan di sepanjang jalan dalam pesantren. Identitas dan ideologi mengenai higienitas di pesantren terus bertahan hingga covid 19 mendera kota ini.

Jika boleh menelisik ke belakang, lahirnya pergeseran makna akan bersih dan sehat dalam masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan persepsi kultural mengenai sehat dan bersih yang dilakukan oleh pemerintahan era Soekarno pada tahun 1950-an dan puncaknya pada era orde baru. Dalam hal ini, penulis ingin menunjukkan bahwa jika harus membuat periodisasi tentang pembentukan persepsi kultural mengenai sehat, setidaknya dapat dibagi dua periodisasi; pertama, masa nasionalisme/ boom minyak (tahun 50-an hingga 80-an), kedua, masa pertengahan 80-an hingga pasca runtuhnya orde Baru, dimana pada pasca runtuhnya orde baru tersebut muncul gejala-gejala baru dalam kesehatan.

Pembentukan persepsi kultural ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Ponorogo. Karena imajinasi masyarakat Ponorogo mengenai kebudayaan sehat dan bersih cenderung berbeda. Sebagai sebuah kota yang sejak semula di bawah pengaruh kebudayaan Kerajaan Surakarta, konsep kesehatan masyarakat Ponorogo pun juga dipengaruhi oleh Salah satu kebudayaan kerajaan Jawa tersebut. Dimana lebih

¹⁵ Miftah faridl, *Islam tentang Kebersihan dan Kesehatan* (Bandung: Pustaka Grafika, 1982)

¹⁶ Kees Van Dijk and Jean Gelman Taylor Eed,.), *Cleanliness and culture Indonesian Histories* (Laiden, KILTV, 2011), hlm. 160.

berpangkal pada segi kodrati artinya sebuah keadaan yang paling dini. Dalam pengertian lain, sehat adalah kondisi yang serba sempurna, baik batin maupun lahir.¹⁷ Dalam masyarakat Jawa konsep berdasarkan fungsi tersebut lebih ditarik dalam ranah penyebab *sangkan paraning Dumadi*,¹⁸ sehingga tercipta sebuah kesan yang cukup berbeda dalam melihat asal usul sakit dan penyakit dalam masyarakat Ponorogo. Inilah mengapa pada saat covid 19 mendera kota ini, banyak tokoh agama yang berusaha melakukan counter budaya dengan mengatakan, semua akan mati, mengapa kita harus mengenakan masker.¹⁹

Kesehatan dan kebersihan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sehat dan bersih tersebut merupakan prasyarat dalam pergaulan seseorang, namun kebutuhannya kerap kali pasca manusia telah terpenuhi segala kebutuhannya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata bersih kerap kali disandingkan dengan kata kebersihan, sedangkan sehat dipadukan dengan kesehatan. Bersih lebih diartikan sebagai bebas dari kotoran, bebas tidak terkena kotoran. Adapun kebersihan lebih merujuk kepada keadaan bersi, suci, bersih dari dosa.²⁰ Sedangkan kata sehat merujuk kepada kondisi tubuh yang sehat. Adapun kesehatan lebih merujuk kepada kondisi yang menyebabkan kepada sehat.²¹ Tidak ada definisi yang ketat dalam hal sehat dan bersih. Dalam penelitian ini, bersih dan sehat tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi pengelolaan tubuh dalam pembentukan persepsi sehat dan bersih dalam masyarakat.

NEGARA, AGAMA DAN KESEHATAN

Harus diakui bahwa kebudayaan sehat dan bersih tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam mengatur kesehatan masyarakat. Wacana politik kesehatan yang dilakukan oleh negara kerap kali berhubungan dengan politik pembangunan. Dengan dalih menghilangkan dan mengurangi dasar-dasar penderitaan yang diderita oleh masyarakat, negara merasa berkepentingan dalam mengatur masyarakat dengan aturan-aturan yang baku. Negara kemudian melirik agama sebagai legitimasi budaya, hal ini karena semenjak lama, Agama Islam telah menjadi mesin struktur terkuat dalam sebuah perubahan sosial.²²

Melalui paradigmanya, masyarakat Indonesia dibentuk dan dinormalisasi dalam tindakan dan perilaku aktivitas warganya.²³ Realita tersebut menunjukkan bahwa manusia Indonesia sangat tergantung dengan sebuah agama. Namun, pesona agama tidaklah tunggal, dalam pengertian bahwa ajaran dan tumpukan pengalaman pemeluknya dalam sendi-sendi

¹⁷ Hartono Moedjisunu, *Kesehatan Menurut Konsepsi Orang Jawa* (Yogyakarta: Yayasan Javanologi, 1984), hlm.15.

¹⁸ Subalidinata, 'Cerita Murwakala dan Ruwatan di Jawa' dalam Djoko Soekiman, *Celaka, Sakit, Obat dan Sehat menurut Konsepsi Orang Jawa* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 5.

¹⁹ Wawancara dengan "bapak imam" tokoh agama di desa Ngunut, 15 April 2020

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 188-1273

²¹ *Ibid.*,

²² Baca Hyung Jun Kim, *Revolusi Prilaku Keagamaan di Pedesaan Yogyakarta* terj. Aditya Pratama (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), Baca Anonim, *laporan-laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1981), baca juga Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformis Islam, dan Kolonialisme Minangkabau*, terj. Samsuddin Berlian (Jakarta: Freedom Institute, 2010).

²³ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik Islam; Epistemologi, Etos dan Model* (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 102

kehidupan, mempengaruhi laju perkembangan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri dalam konteks Indonesia, Agama, terutama agama Islam sebagai agama mayoritas, sehingga sangat terlihat menonjol sebagai simbol narasi dalam dunia publik. Narasi-narasi publik terkesan dibentuk oleh narasi Islam, terutama dalam hal higienitas. Makanan misalnya, munculnya isu pencampuran ajinomoto dengan daging babi memberikan dampak yang signifikan dalam stabilitas negara. Demikian juga dengan kesehatan. Perlibatan ulama dalam merayu masyarakat dalam vaksinasi mendadak bahwa agama menjadi kekuatan penting di Indonesia. Negosiasi ekonomi, agama dan makanan serta kesehatan terlihat dalam kasus ajinomoto dan vaksinasi. Namun, yang menarik adalah negosiasi dan kontruksi identitas makanan itu tidaklah terganggu bila berkaitan dengan globalisasi, bahkan meskipun secara jelas dan gamblang bahwa globalisasi mendekonstruksi identitas nilai agama dalam persoalan makanan yang dipraktekkan masyarakat muslim.

Tidak jauh berbeda dengan makanan, percampuran narasi juga terbentuk dengan dinamis dalam persoalan higienitas. Terlihat bagaimana munculnya persoalan higienitas yang berbeda ditengah-tengah kampung, kota dan pesantren yang dihuni mayoritas Muslim. Tidak dapat dipungkiri, bahwa isu higienitas kerap kali tidak menjadi perhatian serius oleh negara. Namun, lingkaran kekuasaan terkadang harus mengalami ketersentakan dan menjadikannya menjadi isu nasional ketika kebersihan mempengaruhi psikologi kesehatan sebuah negara. Pada tahun 1918, tidak lama setelah perang dunia pertama misalnya, pemerintah Hindia Belanda harus mengalami kegoncangan akibat wabah influenza yang menyebar hebat di Jawa. Hampir ribuan nyawa melayang akibat wabah ini. Di tengah ketidakstabilan negara akibat politik, negara harus mengerahkan segala daya upaya untuk mengatasi hal tersebut.²⁴ Hal yang tidak jauh berbeda, dapat dijumpai pada tahun 1950-an, dimana epidemi malaria yang menyebar ke seluruh pulau di Indonesia. Di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi, Pemerintah Soekarno harus bekerja keras dengan mengeluarkan pelbagai kebijakan untuk menghadapi penyebaran epidemi tersebut.²⁵ Terbaru adalah tersebarnya virus covid 19, pemerintah Indonesia juga berjabaku dengan kegoncangan politik, sosial dan ekonomi.

Terlepas daripada itu, agama memainkan peran yang sangat vital dalam proses pembentukan wacana kesehatan dan kebersihan terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa agama harus bersaing dengan modernitas untuk membentuk kontruksi sehat, sehingga terkadang muncul dugaan bahwa adanya politik keagamaan dalam setiap keputusannya. Hal itu bisa saja terjadi, karena pada dasarnya politik keagamaan yang diusung ulama kerap kali tersamarkan ketika berhadapan dengan penguasa. Melalui legitimasinya sebagai pemegang otoritas agama, ulama memainkan perannya dalam hal pembentukan wacana sehat di Indonesia. Namun demikian, hubungan

²⁴ Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman; Suatu Kisah Kekeluargaan Tertulis* terj. Muhammad Radjab (Jakarta: Indera, ttp), hlm. 112.

²⁵ Mengenai politik kebijakan kesehatan pada era kepemimpinan Soekarno baca Baha Uddin, "Politik Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Pasca Kemerdekaan," diakses 14 November 2018, https://www.academia.edu/20814025/Politik_Kesehatan_Masyarakat_di_Indonesia_Pasca_Kemerdekaan.

antara negara, agama yang diwakili oleh ulama, dalam hal kesehatan kerap kali naik turun. Tidak selamanya ulama mendukung konsep yang didengungkan oleh pemerintah. Selama beberapa dekade, terjadi ketegangan antara keduanya.

Modernitas yang tengah terjadi di Indonesia semenjak awal abad ke-20 hingga abad ke-21 ini dengan masuknya pelbagai industri, bisa saja menyampaikan pesan bahwa dunia tengah terjadi perubahan besar, akan tetapi tidak demikian dengan kesehatan. Konsep dan konstruksi kesehatan yang ada dalam masyarakat masih dikuasai oleh Agama sebagai legitimasi, terutama dalam hal masalah preventif atas penularan penyakit. Dalam banyak hal terkait konstruksi kesehatan, pasca naiknya Jokowi sebagai presiden, mirip dengan keadaan tahun 1931-an, ketika negara ini baru saja mengalami kekacauan ekonomi dan sedang genjar-genjarnya pembangunan.

Di dua periode tersebut, Indonesia tengah berusaha membangun negara yang modern, setelah didera gejolak ekonomi, memang tidak dapat dipungkiri gejolak ekonomi yang mendera tidak sama. Akan tetapi, gejala terhadap konstruksi kesehatan hampir sama, agama memiliki peran vital dalam penentuan wacana kesehatan. Pada tahun 1932 hingga tahun 1934 misalnya, masyarakat masyarakat Jawa Barat melakukan penolakan hingga hampir terjadi sebuah pemberontakan besar terhadap pemerintah atas usaha preventif pemerintah melalui dokter terhadap penyebaran penyakit paru-paru. Penolakan ini semakin mendapat legitimasi penuh oleh ulama-ulama pesantren yang terkumpul dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwanya mengenai larangan dalam mengoperasi mayat.

Dalam hasil muktamar NU yang ke-6 (Cirebon), ke-7 (Cirebon) dan ke-8 (Jakarta) pada tahun 1931, 1932, dan 1933 misalnya, memutuskan bahwa membedah dan mengoperasi bagian tubuh manusia yang telah meninggal tidak diperkenankan oleh Syara'.²⁶ Tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama', dalam putusan kongres Muhammadiyah pada tahun 1933, Muhammadiyah juga mendukung keputusan yang dikeluarkan NU tersebut.²⁷ Pada dasarnya pandangan ulama mengenai fatwa tersebut lebih kepada politik keagamaan yang sedang dimainkan secara cantik. Hal inilah membuat banyak orang yang terkecoh, yang seakan-akan murni berdasarkan pada prinsip agama.²⁸ Padahal prinsip kesehatan yang diusung oleh para ulama pada saat itu adalah kesehatan yang tidak merusak harkat martabat manusia.

Tidak jauh berbeda pada era Hindia Belanda, pada era modern, turut sertanya agama dalam mengkonstruksi wacana kesehatan yang di Indonesia, membuat dinamika ketegangan ideologi lahir ditengah-tengah masyarakat. Hal ini karena pemegang otoritas agama tidaklah berdiri dalam satu isu tertentu, tetapi berdiri dalam beberapa isu mengenai pelbagai problem kehidupan masyarakat, baik itu isu kesehatan, isu pembatasan keturunan, bahkan

²⁶ Ahmad Ramali, *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam hukum Sjara' Islam* terj. Pamoentjak, cet II, (Jakarta Balai Pustaka, 1956), hlm. 177

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

isu ekonomi, sehingga ketika pemegang otoritas atau institusi keagamaan memfatwakan tentang sesuatu yang halal misalnya, akan selalu berbenturan dengan isu yang lain. Hal ini terlihat pada kejadian munculnya keputusan MUI no 4 tahun 2016 mengenai hukum mubah imunisasi tidak membuat masyarakat yakin atas kehalalan serum imunisasi tersebut. Hal itu membuat pemerintah Jokowi melalui kementrian kesehatan harus melakukan lobi-lobi khusus terhadap dewan agama tersebut. Permohonan itu setidaknya berhasil sehingga melahirkan fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang kehalalan imunisasi tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemegang otoritas keagamaan dalam mengambil sebuah keputusan hukum, lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik keagamaan dibandingkan dengan pertimbangan isu kesehatan semata.

Menginjak akhir tahun 2019, suasana dunia sedang dihantam wabah covid 19, bermula di China kemudian menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Wabah itu menghancurkan peradaban dunia, terlebih efek yang ditimbulkan cukup mengerikan. Hampir dua tahun Indonesia dan dunia harus terkungkung dengan wabah tersebut. Situasi tegang, bingung dan mencekam dalam menghadapi wabah tersebut.²⁹ Pemerintah Indonesia melalui Dinas Kesehatan menganjurkan masyarakatnya untuk memakai masker dan senantiasa mencuci tangan. Namun uniknya, wacana kesehatan yang diproduksi oleh negara tersebut ditentang keras oleh para ulama'. Para ulama' yang awalnya mendukung kebijakan pemerintah dalam hal imunisasi, kini berbalik menolaknya. Isu-isu kebersihan dalam menghadapi covid 19 di counter dengan berbagai pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat.

ULAMA DAN PEMBENTUKAN WACANA KESEHATAN DI MASYARAKAT

Ulama' dan Pesantren tidak bisa dipisahkan. Sekalipun terkadang terdapat ulama' yang tidak memiliki pesantren. Di pesantren secara harfiah adalah tempat bergumuhnya santri dalam bertafaquh *fi al- din* atau pendalaman pemahaman agama. Melalui lembaga pesantren, santri memahami agama bukan saja sebagai doktriner, tetapi juga sebagai sistem nilai. Dimana sistem nilai yang berupa norma-norma hidup disusun dan dibuat kyai menjadi titik tolak dalam segala kegiatan di dalam pesantren.

Hal tersebut, bila dikaitkan dalam konteks budaya, kyai berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu dengan tujuan melestarikan sistem nilai yang telah membentuk dunia pesantren tersebut. Dalam konteks inilah kemudian, Geertz menyebut kyai sebagai *cultural brokers*, dimana kyai menyaring dan mengeluarkan budaya yang sesuai dalam pesantrennya. Apa yang diungkapkan oleh Geertz tersebut, membawa kita untuk masuk dalam sebuah struktur berfikir bahwa Institusi pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah bukan sekedar area pembentukan karakter kepribadian tetapi juga sebagai tempat pembentukan wacana. Senada dengan hal tersebut, Bourdieu, mengatakan

²⁹ Rusdi Rusdi, "Pandemi Penyakit Dalam Sejarah Dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik," *Diakronika* 20, no. 1 (30 Juni 2020): 50–60, <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/146>.

bahwa pembentukan wacana-wacana tersebut merupakan bagian dominasi terstruktur, yang dilakukan oleh para agen dalam menghadirkan produk-produk dominasinya.³⁰

Produk dominasi dapat berupa wacana, citra, dan ideologi. Hal mana menurut Paul Ricoeur, sebagaimana yang dikutip Haryatmoko mengatakan bahwa ideologi tidak hanya berfungsi sebagai pemisahan sebuah identitas, tetapi juga sebagai sebuah elemen penting dalam melanggengkan sebuah tindakan sosial.³¹ Ideologi mempunyai bentuk yang sistematis sehingga cenderung menjadi sebuah doktriner yang kuat dalam setiap gagasan-gagasan yang akan dikembangkan, dalam hal ini adalah contohnya wacana kesehatan dan kebersihan.

Semua masyarakat di Ponorogo mungkin akan sepakat, bahwa kesehatan adalah hal utama atau yang paling utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyebutkan bahwa kesehatan adalah sebuah mata rantai dalam pencapaiannya manusia menuju tujuan akhir kehidupan manusia, yaitu bertemu dengan Allah di akhirat.³² Ibnu Taimiyah dengan mengatakan tidaklah engkau ketahui, bahwa makan, minum, dan berpakaian adalah sebuah perkara wajib bagi dirimu, sehingga apabila terpaksa tidak menemukan sesuatu yang halal, maka wajiblah dirimu memakan barang haram, semisal bangkai agar engkau memiliki kekuatan dalam hidup.³³

Di samping berdasarkan salah satu dari lima upaya menjaga agama, budaya pesantren juga memproduksi konsep-konsep yang sifatnya mistik. Jika *Maqashid as-Syariah* ditujukan untuk mengukuhkan manusia sebagai makhluk sempurna, yang termanifestasi dalam ilmu-ilmu fiqh, maka mistik ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang kosmologi bagi santri. Dalam khasanah budaya pesantren misalnya, kita mengenal istilah *berokah*. Suatu konsep tentang realitas kosmos dan kedudukan santri dalam pesantren. Dalam budaya Jawa, konsep barokah dikenal dengan berkat. Melalui konsep ini kyai kemudian memproduksi pelbagai wacana dalam dunia pesantrennya bahkan di tengah-tengah masyarakat.

Bagi masyarakat Ponorogo, apa yang dikatakan seorang kyai atau ulama' bukanlah sesuatu yang tidak logis, tetapi sangatlah logis dan mengena dalam benak masyarakat Ponorogo. Hal ini terlihat dari video yang di share dan beredar masif di WA-wa group bahwa terdapat seorang kyai yang berpidato dalam sebuah pengajian umum, dimana saat itu sedang puncak-puncaknya persebaran wabah itu di Jawa Timur. Sosok kyai tersebut mengatakan kita tidak perlu takut akan covid, karena sebagai orang Islam kita selalu melakukan wudhu setiap kali akan sholat. Sehingga dengan sendirinya di covid tersebut akan hilang dan tidak mengenai kita.

³⁰ Pierre Bourdieu, *Dominasi*, hlm. 34

³¹ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat; Akar kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 88-89

³² Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Hlm. 10

³³ Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad ibn Taymiyyah, *As-Syiyasah as-Syar'iyah fii al-Islahi ar-Ro'i wal Ro'iyah* (Bairut: Ad-Darul Ifa' al-Jadidah, 1983), hlm. 20.

Tidak jauh berbeda dengan video tersebut, seorang ulama' lain juga mengeluarkan pendapatnya bahwa kita (masyarakat muslim) sebenarnya telah memiliki masker yang lebih ampuh daripada masker-masker yang di jual di pasaran. Dengan membaca doa khusus yang diajarkan oleh beliau, maka insya allah kita akan terhindar dari virus covid 19. Pembentukan wanaca kesehatan dan kebersihan oleh para ulama tersebut setidaknya dapat dibaca sebagai sebuah counter budaya yang dilakukan oleh para ulama atas dominasi yang tengah terjadi, dengan membangun dominasi baru.

Konsep dominasi itu setidaknya dapat dibangun dari tiga elemen sederhana yaitu, pertama, kondisi kekuatan yang tidak seimbang, baik itu berupa sumber daya dan monopoli power. Kedua, kondisi ketergantungan, dan ketiga, kondisi ketidakpatuhan atas aturan.³⁴ Dari sinilah kemudian produsen budaya atau agen sebagai “pemilik modal” dalam dunia kesehatan berusaha mendapatkan momennya untuk mendapatkan kesempatan dengan membuat struktur-struktur dalam mengkonstruksi identitas dengan dominasi-dominasi yang dimiliki agen.

Dalam konteks fenomena higienitas di Ponorogo, maka agen dominasi adalah kyai karena mereka memiliki power. Power disini dapat dikaitkan dengan penguasaan keilmuan seorang kyai dalam pesantren. Dinamika budaya pesantren erat kaitannya dengan dominasi simbolik. Sehingga ajaran mengenai *barokah* sudah menjadi *embodied* dalam diri setiap santri dan masyarakat umum di Ponorogo. Hal ini karena peran Kyai sangatlah sentral karena dia adalah pemilik pesantren, intelektual dan pembuat aturan.³⁵ Posisi santri dan masyarakat umum “hampir” dapat dilihat tidak mempunyai otoritas dalam menentukan konsep kesehatan. Ketergantungan yang sangat tinggi ditambah rasa percaya yang tinggi menjadikan santri dan masyarakat umum sangatlah patuh terhadap Kyai.

Satu hal yang nampaknya perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa budaya Islam di Jawa menekankan kepentingan rohani daripada tubuh. Hal ini terlihat dari beberapa slogan yang muncul dalam pesantren. Slogan tersebut terkadang berbentuk syair atau *plesetan* dari sebuah slogan yang berkembang di masyarakat. Misalnya adalah, “*siapa yang kuat ruhaninya, maka ia dapat mengkontrol badaniahnya*”, “*siapa yang belum kudisan, maka tidak sah mondoknya.*” Slogan-slogan tersebut, menunjukkan bahwa tubuh dan lingkungan bukanlah hal yang penting dalam dunia pesantren,³⁶ terlebih lagi bagi laki-laki.

Ekspresi-ekspresi tersebut menunjukkan bahwa wacana-wacana yang dikembangkan oleh kyai tentang hidup sederhana cukuplah ampuh dalam membentuk dan membendung budaya *panic bayying*, sehingga dapat dikatakan hal tersebut sebagai sebuah strategi pengembangan budaya Islam di tengah-tengah masyarakat. Menurut Eliade, sebagaimana

³⁴ Francis N. Lovett dan The Hegeler Institute, “Domination: A Preliminary Analysis,” ed. oleh Sherwood J. B. Sugden, *Monist* 84, no. 1 (2001): 98–112, <https://doi.org/10.5840/monist20018414>.

³⁵ Mengenai kuatnya kyai dalam membentuk aturan di pesantren Baca, Zamakhsyari Dhofier, “konsep Pendidikan Kyai Wahid; Meramu Pesantren dengan Modernitas pendidikan” dalam Shofiyullah (ed.), *KH. A. Wahid Hasyim, Sejarah, Pemikiran, dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa* (Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011), hlm. 315

³⁶ Erik P. Eckhlom, *Masalah Kesehatan; Lingkungan sebagai Sumber Penyakit* terj. Tim penerjemah (Jakarta: Yayasan Obar, 1980), hlm. 15

yang dikutip oleh Mary Douglas, apa yang dilakukan masyarakat tersebut adalah sebuah tata nilai dalam agama yang memadukan antara kekotoran dan kesucian.³⁷

KESIMPULAN

Covid 19 telah menunjukkan perubahan yang menarik dalam konsep kebersihan dalam masyarakat. Di saat masyarakat dunia berlomba-lomba untuk merubah citra diri sebagai negara sehat kuat dengan standar-standar yang diterapkan oleh WHO. Justru masyarakat Indonesia memproduksi wacana kesehatan dan kebersihan sendiri dengan bantuan legitimasi agama, yang tentunya melalui ulama. Agama menjadi sebuah legitimasi bagi berkembangnya standarisasi budaya kesehatan dan kebersihan yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Karena kyai atau ulama sebagai sebagai agen sosial dalam legitimasi kesehatan, maka ulama juga kemudian memproduksi pelbagai wacana kesehatan yang diaplikasikan kepada umatnya. Wacana-wacana yang dilempar oleh kyai menjadi panduan hidup bagi masyarakat. Meskipun budaya tersebut acapkali harus berbenturan dengan kebijakan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniels, Timothy P. "Islamic Spectrum in Java," t.t., 210.
- Delimah, Veta Lidya, Syaharani Zahra, Nindia Oktavia, Lutfiani Nur Lestari, Muhammad Irfan Soekardjo, dan Sarah Saleha Saleha. "Meningkatkan Kebersihan Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif* 3, no. 2 (1 Agustus 2022): 57–66. <https://doi.org/10.32493/jlklklk.v3i2.p57-66.23062>.
- Lovett, Francis N. dan The Hegeler Institute. "Domination: A Preliminary Analysis." Disunting oleh Sherwood J. B. Sugden. *Monist* 84, no. 1 (2001): 98–112. <https://doi.org/10.5840/monist20018414>.
- Misbahuddin, Muhammad. "Baju Lurik, Kemben Dan Kemeja Perubahan Fashion Masyarakat Jelata Di Surakarta Abad Ke-20." *PROCEEDINGS: Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 2 (14 Mei 2017): 998–1006.
- Muhaimin, Abdul Ghoofur. "The Islamic Traditions of Cirebon." *ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia*, 1995, 304.
- Nordholt, Henk Schulte. "De-Colonising Indonesian Historiography," t.t., 25.
- Pigeaud, Theodore G. Th. *Java in the 14th Century A Study in Cultural History*, 1960. <http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-94-011-8150-1>.
- Rozaki, Abdur. "Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas)," no. 2 (2013): 14.
- Rusdi, Rusdi. "Pandemi Penyakit Dalam Sejarah Dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik." *Diakronika* 20, no. 1 (30 Juni 2020): 50–60. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/146>.
- Suprpto, Suprpto. "Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Era Pandemi COVID-19." *Abdimas Singkerru* 1, no. 1 (2021): 1–7.
- Uddin, Baha. "Politik Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." Diakses 14 November 2018. https://www.academia.edu/20814025/Politik_Kesehatan_Masyarakat_di_Indonesia_Pasca_Kemerdekaan.

³⁷ Mary Douglas, *Purty and Danger; an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 1966), hlm. 8

- Shofiyullah (ed.), KH. A. Wahid Hasyim, *Sejarah, Pemikiran, dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa* (Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011)
- Mary Douglas, *Purty and Danger; an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 1966)
- Erik P. Eckhlom, *Masalah Kesehatan; Lingkungan sebagai Sumber Penyakit* terj. Tim penerjemah (Jakarta: Yayasan Obar, 1980).
- Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad ibn Taymiyyah, *As-Siyasah as-Syar'iyah fii al-Islahi ar-Ro'i wal Ro'iyah* (Bairut: Ad-Darul Ifa' al-Jadidah, 1983)
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat; Akar kekerasan dan Diskriminasi* Jakarta: Gramedia, 2010
- Ahmad Ramali, *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam hukum Sjara' Islam* terj. Pamoentjak, cet II, Jakarta Balai Pustaka, 1956.
- Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman; Suatu Kisah Kekeluargaan Tertulis* terj. Muhammad Radjab Jakarta: Indera, ttp
- Subalidinata, 'Cerita Murwakala dan Ruwatan di Jawa' dalam Djoko Soekiman, *Celaka, Sakit, Obat dan Sehat menurut Konsepsi Orang Jawa* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
- Wawancara dengan "bapak imam" tokoh agama di desa Ngunut, 15 April 2020
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Hyung Jun Kim, *Revolusi Prilaku Keagamaan di Pedesaan Yogyakarta* terj. Aditya Pratama Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017
- Anonim, *laporan-laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX* Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1981
- Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformis Islam, dan Kolonialisme Minangkabau*, terj. Samsuddin Berlian Jakarta: Freedom Institute, 2010
- Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik Islam; Epistemologi, Etos dan Model* Yogyakarta: UGM Press, 2016